



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 1034 /KEP/PTK-UKM/ IV /2024
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS DAGNAKERKOP UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Renja OPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra OPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta Arah Kebijakan teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Dagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Padang Pariaman;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA DINAS DAGNAKERKOP UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Dagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DAGNAKERKOP
UKM TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian Renja OPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini.

Pasal 4

Renja OPD Tahun 2025 merupakan pedoman seluruh Komponen Dinas Dagnakerkop UKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop UKM ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Parlaman
pada tanggal : 19 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman


ION KENEDI, S. Sos. MM
NIP. 19690525 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No 86 tahun 2017 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop & UKM yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Dagnakerkop & UKM demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman



ION KENEDI, S. Sos. MM
NIP. 19690525 198903 1 007

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disdagnakerkop &UKM	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	40
	2.3 Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	41
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS DAGNAKERKOPUKM	56
	3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Daerah ...	56
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	58
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	61
BAB V	PENUTUP	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop dan UKM dan (Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2025 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2025 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Renja SKPD tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026. Untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD kita mempedomani 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2014-2022, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) RPJMD Tahun 2021-2026 dan 6) RENSTRA Revisi Dinas Dagankerkop dan UKM tahun 2021 -2026.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Dagnakerkop dan UKM. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Kopersi dan UKM.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Dinas Dagnakerkop dan UKM. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 21) Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
- 23) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 24) Peraturan Kepala Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dagnakerkop dan UKM disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2025 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop dan UKM adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Dagnakerkop dan UKM.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Dagnakerkop dan UKM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Dagnakerkop dan UKM dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB 1.PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA DINAS DAGNAKORKOP DAN UKM TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Dagnakerkop & UKM

2.1.1 Gambaran Umum Kinerja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2023

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah tanggal 11 November 2016.

Yang dijelaskan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM beralamat di Jl. Syam Ratulangi No. 30 pariaman no. telp. (0751) 92105.

Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dan UPT terdiri dari, 1 buah eselon II , 1 (satu) eselon IIIa, 5 (lima) eselon IIIb dan 16 (enam belas) Fungsional. Pada UPT, 2 (satu) Eselon IVa , 2 (satu) eselon IV.B

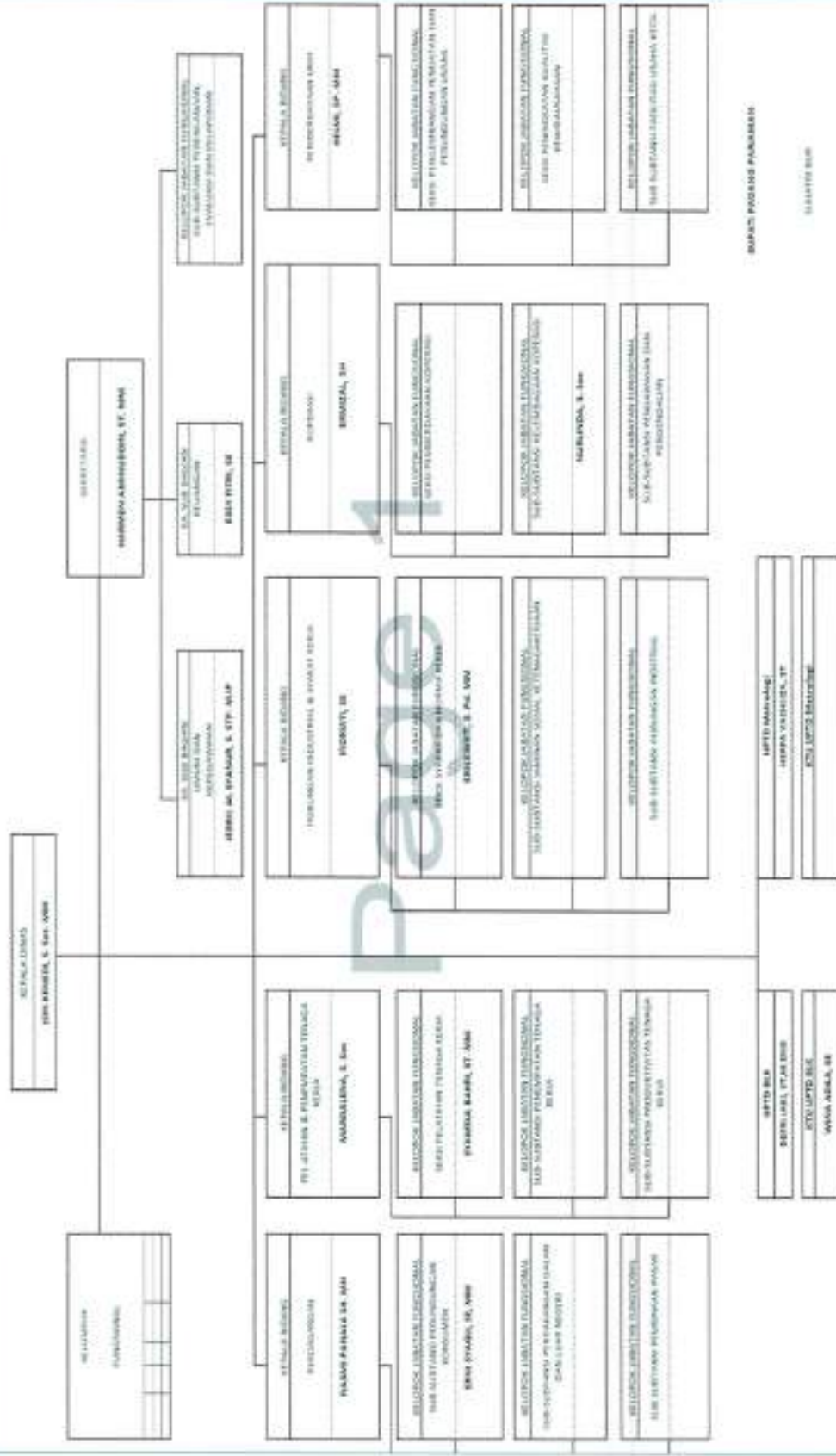
1. Struktur Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi dan pejabat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat dilihat seperti berikut ini :

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

STUDI TEROR ORGANISASI PERUSAHAAN DAN
DINAS PERENCANAAN TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMM
SUKSES PENCANAAN MANUSIA

Country	France
Region	Normandie
City	Caen
Year	2021



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 60 Tahun 2016, Dinas Dagnakerkop dan UKM mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan/ atau
- f) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas , Sekretariat, 5 Bidang Teknis Program yaitu dan Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan UKM, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

MISI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM bertanggungjawab untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman , khususnya terhadap misi sebagai berikut :

- MISI III : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.**
- MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.**
- MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**

2.1.2 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1.2.1
Misi,Tujuan, dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2	3	4
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan,Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi
	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan Omzet Usaha UMKM
	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Cakupan bina pedagang informal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2	3	4
Meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja
	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga kerja
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISDAGNAKERKOPUKM	Nilai SAKIP DISDAGNAKERKOPUKM Hasil Evaluasi Inspektorat

2.1.3 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan DPA Tahun 2023 Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja, realisasi belanja

Tabel 2.1.3.1
Realisasi Belanja tahun 2023

URUSAN WAJIB/ PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN DPA	REALISASI BELANJA LANGSUNG				PERSE NTASE (%)
			BELANJA PEGAWAY	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	
Urusan Wajib Koperasi	0	790.930.000	0	755.850.086	0	755.850.086	95.56
Urusan Wajib Tenaga Kerja	0	357.612.950	0	348.746.350	0	357.612.950	97.52
Urusan Pilihan Perdagangan	4.857.107.583	1.383.166.995	4.767.119.919	1.166.551.558	1.200.000	5.934.871.477	95.10

Hasil Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2023 diuraikan pada Tabel 2.1.3.4 dan 2.1.3.5. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

- 4 program 6 Subkegiatan Bidang Perdagangan
- 1 program 2 Subkegiatan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- 1 program 3 Subkegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- 4 program 4 Subkegiatan Bidang Koperasi
- 2 program 4 Subkegiatan Bidang Pemberdayaan UKM
- 1 program 14 Subkegiatan bidang kesekretariatan
- 1 program 1 subkegiatan UPTD Metrologi Legal



Dalam mengukur capaian kinerja menggunakan dua pendekatan, antara lain:

- 1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk klasifikasi penilaian terkait capaian kinerja Program dan Sub Kegiatan dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 2.1.3.2
Klasifikasi Kategori Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

NO	Klasifikasi Capaian Penilaian	Kategori
1	≥100 %	Sangat Berhasil
2	90 % sd < 100 %	Berhasil
3	70 % sd < 90 %	Cukup Berhasil
4	50 % sd < 70 %	Kurang Berhasil
5	0 % sd < 50 %	Gagal

TABEL 2.1.3.3
REALISASI PROGRAM DINAS DAGNAKERKOP DAN UKM TAHUN 2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Outcome : Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	40	40	100
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Outcome :Persentase Koperasi Aktif	%	42,8	40	95,28
3	Program Pendidikan dan latihan	Outcome : Persentase Koperasi yang berkualitas	%	40	40	100
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Outcome :Persentase Koperasi Sehat	%	40	40	100

5	Program Pengembangan UMKM	Outcome : Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing	%	65	65.38	100.58
6	Program an Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Outcome : Rasio Pertumbuhan Wira Usaha Baru yang bersekala Mikro	%	0,90	0,78	86,67
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Outcome : Persentase Pasar Bana (Bersih, Aman, Nyaman, Asri)	%	2.56	2.56	100
8	Program Pengembangan Ekspor	Outcome : Jumlah Pengusaha Ekspor yang tumbuh	%	1	1	100
9	Program Penggunaan dan Pemasaran produk dalam Negeri	Outcome : Terwujudnya Pasar Bana	Pasar	1	1	100
10	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Outcome : Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	46	45	97.83
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Outcome : Pasar Tertib Ukur	Pasar	1	1	100
12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	70	70	100
13	Program Hubungan Industrial	Outcome : Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	51	69	135,29
14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome : Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A	A	100

TABEL 2.1.3.4
Capaian dan Evaluasi Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Ketenagagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	50	30	60
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	18	18	100
3	Program Pendidikan dan latihan Perkooperasian	Pendidikan dan Latihan Perkooperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkooperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	output : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkooperasian	Orang	32	64	200
4	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20	15	75
5	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Output : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	60	64	106.66

DINAS DAGNANERKOP DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Output : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1000	1350	135
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Output : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	51	102
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Output : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	100	100
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	1	100
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Output : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	1	100

DINAS BAGNAKERKOP DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
8	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku usaha	10	6	60
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Unit Usaha	15	8	53.33
10	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Output : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	12	100
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Output : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	1100	805	73.18
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	250	359	143.6

DINAS DAGNANERKOP DAN UKM KAB PADANG PARAHAMIN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
13	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Output : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	5	5	100
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Output : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	12	10	83,33
			Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Output : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dokumen	1	1	100
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	10	4	400
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	7		70
			Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12		100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		100
			Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		100
			Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12		100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		100
			Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	7		43,75

DINAS DAGNAKERKOP DAN IKM KUB PADANG PARIAMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	26	40.62
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6	3	50
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	48	48	100
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	100

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

Realisasi Keuangan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023

TABEL 2.1.3.5

Realisasi Keuangan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	12,040,000	0	12,000,000	0	12,000,000	99.67	40,000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,040,000	0	12,000,000	0	12,000,000	99.67	40,000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12,040,000	0	12,000,000	0	12,000,000	99.67	40,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	29,335,000	0	29,223,500	0	29,223,500	99.62	111,500
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	29,335,000	0	29,223,500	0	29,223,500	99.62	111,500
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	29,335,000	0	29,223,500	0	29,223,500	99.62	111,500
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406,770,000	0	397,864,300	0	397,864,300	97.81	8,905,700

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

DINAS PERKOPERAN TENGAH DAERAH KABUPATEN PINJANG							
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
		PEGAJAW	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406,770,000	0	397,864,300	0	397,864,300	97.81	8,905,700
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406,770,000	0	397,864,300	0	397,864,300	97.81	8,905,700
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	13,850,000	0	13,810,000	0	13,810,000	99.71	40,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,850,000	0	13,810,000	0	13,810,000	99.71	40,000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	13,850,000		13,810,000	0	13,810,000	99.71	40,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	241,913,000	0	232,458,727	0	232,458,727	96.09	9,454,273
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	241,913,000	0	232,458,727	0	232,458,727	96.09	9,454,273
Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	241,913,000	0	232,458,727	0	232,458,727	96.09	9,454,273
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	87,022,000	0	70,493,559	1,200,000	71,693,559	82.39	15,328,441

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA RAKYAT							
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
		PEGAUAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	87,022,000	0	70,493,559	1,200,000	71,693,559	82.39	15,328,441
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	38,764,000	0	22,663,330	0	22,663,330	58.46	16,100,670
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	28,338,000	0	28,047,229	0	28,047,229	98.97	290,771
Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19,920,000	0	19,783,000	0	19,783,000	99.31	137,000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	311,905,000	600,000	287,390,530	0	287,990,530	92.33	23,914,470
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	11,905,000	0	6,880,000		6,880,000	57.79	5,025,000
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11,905,000	0	6,880,000		6,880,000	57.79	5,025,000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	300,000,000	600,000	280,510,530	0	281,110,530	93.70	18,889,470
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	300,000,000	600,000	280,510,530		281,110,530	93.70	18,889,470
Program Pengembangan Ekspor	10,000,000	0	6,910,000	0	6,910,000	69.10	3,090,000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	0	6,910,000	0	6,910,000	69.10	3,090,000

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIMAN

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
		PEGAJAWI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	10,000,000		6,910,000		6,910,000	69.10	3,090,000
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99,999,090	0	94,821,768	0	94,821,768	94.82	5,177,322
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,999,090	0	94,821,768	0	94,821,768	94.82	5,177,322
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	99,999,090		94,821,768		94,821,768	94.82	5,177,322
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	29,195,000	0	19,870,600	0	19,870,600	68.06	9,324,400
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	15,000,000	0	12,770,100	0	12,770,100	85.13	2,229,900
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15,000,000		12,770,100		12,770,100	85.13	2,229,900
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,195,000	0	7,100,500	0	7,100,500	50.02	7,094,500
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14,195,000		7,100,500		7,100,500	50.02	7,094,500
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	52,062,300	0	46,144,000	4,200,000	50,344,000	96.70	1,718,300
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	52,062,300	0	46,144,000	4,200,000	50,344,000	96.70	1,718,300

RENJA TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	52,062,300		46,144,000	4,200,000	50,344,000	96.70
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	299,964,950		297,322,350	0	297,322,350	99.12
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	271,012,450		268,754,010	0	268,754,010	99.17
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	271,012,450		268,754,010	0	268,754,010	99.17
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28,952,500		28,568,340	0	28,568,340	98.67
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28,952,500	0	28,568,340	0	28,568,340	98.67
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	57,648,000	0	51,424,000	0	51,424,000	89.20
Pegesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang berna Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39,480,500	0	35,824,000	0	35,824,000	90.72
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	21,270,500	0	20,394,000	0	20,394,000	95.88
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	18,218,000	0	15,430,000	0	15,430,000	84.70
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,159,500	0	15,600,000	0	15,600,000	85.91
						2,559,500

RENJA TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIMAN

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,159,500	0	15,600,000	0	15,600,000	2,559,500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5,737,113,187	4,767,119,919	706,614,660	1,200,000	5,474,934,579	262,178,608
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,256,000	0	31,744,600	0	31,744,600	15,511,400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47,256,000		31,744,600	0	31,744,600	15,511,400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,580,000	0	13,089,596	0	13,089,596	490,404
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,580,000		13,089,596	0	13,089,596	490,404
Administrasi Umum Perangkat Daerah	182,495,500		150,499,582	0	150,499,582	31,995,918
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,926,400		3,542,000	0	3,542,000	3,384,400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,569,100		146,957,582		146,957,582	28,611,518
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,200,000		-	1,200,000	1,200,000	-

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

DINAS PRIBUMAHAN TENAGA KERJA KOPERASI DAS URM AND PABANG PABANG							
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,200,000		-	1,200,000	1,200,000	100.00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570,100,105		466,995,882	0	466,995,882	81.91	103,104,223
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66,027,825		55,451,135		55,451,135	83.98	10,576,690
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,680,000		59,221,807		59,221,807	94.48	3,458,193
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441,392,280		352,322,940		352,322,940	79.82	89,069,340
Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,064,000	0	34,335,000	0	34,335,000	62.35	20,729,000
Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,100,000	0	23,461,000	0	23,461,000	68.80	10,639,000
Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,700,000	0	8,525,000	0	8,525,000	57.99	6,175,000
Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,264,000	0	2,349,000	0	2,349,000	37.50	3,915,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,867,417,582	4,767,119,919	9,950,000	0	4,777,069,919	98.14	90,347,663
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,733,272,382	4,660,759,919	-	0	4,660,759,919	98.47	72,512,463
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123,835,200	106,360,000	-	0	106,360,000	85.89	17,475,200

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.310.000	0	9.950.000	0	9.950.000	360.000
	7.388.817,527	4.767.719,919	2.266.347,994	6.600.000	7.040.667,913	348.149,614

Secara keseluruhan program yang ada di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 14 program dengan 34 sub kegiatan dimana terdapat tiga bidang urusan yaitu urusan perdagangan, urusan tenaga kerja dan urusan koperasi dan UKM dengan total belanja langsung sebesar Rp. 7388.817.527 dengan total realisasi sebesar Rp. 7.040.667.913 dan persentase realisasi sebesar 95,29 %. Untuk lebih rincinya dapat dilihat berdasarkan masing-masing bidang urusan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.6
Bidang Urusan Perdagangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI JENIS BELANJA			TOTAL REALISASI	%
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99.999.090	0	94.821.768	0	94.821.768	94.82
2	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	311.905.000	600.000	280.510.530	0	281.110.530	93.70

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

3	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	29.195.000	0	19.870.600	0	19.870.600	68,06
4	Program Pengembangan Ekspor	10.000.000	0	6.910.000	0	6.910.000	69,10
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	52.062.300	0	45.114.000	4.200.000	50.344.000	96,70
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.737.113.187	4.767.119.919	700.614.660	1.200.000	5.474.934.579	95,43
TOTAL		6.240.274.577	4.767.119.919	1.161.751.558	5.400.000	5.934.871.477	95,11

Tabel 2.1.3.7
Bidang Urusan Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI JENIS BELANJA			TOTAL REALISASI	%
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	299.964.950	0	297.322.350	0	297.322.350	99,12
2	Program Hubungan Industrial	57.648.000	0	51.424.000	0	51.424.000	89,20
TOTAL		357.612.950	0	348.746.350	0	348.746.350	97,52

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

Tabel 2.1.3.8

Bidang Urusan Koperasi dan UKM

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI JENIS BELANJA			TOTAL REALISASI	%
			PEGAJAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	29.235.000	0	29.223.500	0	29.223.500	99,62
2	Program Pemilahan Kesehatan KSP /USP Koperasi	13.850.000	0	13.810.000	0	13.810.000	99,71
3	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	406.770.000	0	397.864.300	0	397.864.300	97,81
4	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12.040.000	0	12.000.000	0	12.000.000	99,64
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	87.022.000	0	70.493.559	1.200.000	71.693.559	82,39
6	Program Pengembangan UMKM	241.913.000	0	232.458.727	0	232.458.727	96,09
TOTAL		777.080.000	0	742.040.086	1.200.000	743.240.086	95,65

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.1.4 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.4.1

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengawasan dan Pemertiksaan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Ketenagagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	50	30	60
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20	15	75
3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Unit Usaha	15	8	53.33

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Output : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertengkapan Ditera Ulang	Unit	1100	805	73.18
5	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Output : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	12	10	83.33
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	7	70
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	7	43.75
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	26	40.62
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6	3	50

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

2.1.5 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.5.1

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pengawasan dan Pemertasaan Kopernasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Persundang-Undangan Kevenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	18	18	100
2	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Output : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	60	64	106.66
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dgnan para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Output : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1000	1350	135
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Output : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	51	102

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARLAMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
				Output : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	100	100
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	1	100
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Output : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	1	100
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Output : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	12	100
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	250	359	143.6
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Output : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	5	5	100

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
7	Program Hubungan Industrial	Penggesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Output : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dokumen	1	1	100
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	10	4	400
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	48	48	100
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12		100

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM Kabupaten padang pariaman adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan.
 2. Masih kurangnya SDM, kuantitas maupun kualitas dengan beban kerja yang dimiliki oleh Dinas Dagnakerkop dan UKM.
 3. Kurangnya sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kendaraan bermotor dan mobiler.
 4. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana usaha kecil menengah dan masih banyaknya koperasi yang tidak aktif yang perlu dibina kembali karena memiliki volume usaha yang cukup tinggi.
 5. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana perdagangan, konflik pengelola pasar rakyat perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
 - 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 1. Penyediaan faasilitas penyelesaian hubungan Industrial antara pekerja denagn pemberi kerja, melalui deteksi dini tingkat kerawanan hubungan Industrial di perusahaan.
 2. tersedianya kebijakan pemerintah terkait iklim perdagangan, sarana perdagangan semakin baik, kontribusi swasta/masyarakat semakin meningkat, dan infrastruktur lalulintas harus semakin baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Dagnakerkop dan UKM berdasarkan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA (TAHUN)						CAPAIAN KINERJA (TAHUN)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	1 Persentase Volume Usaha koperasi	%	3,5	3,5	4,5	5	5,5	6	9,02	10,4	9,4			
2	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	2 Persentase Omzet Usaha UMKM	%	3,01	3,01	3,03	3,1	3,15	3,2	3,04	3,04	3,8			
3	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang kondusif dan Terkendali	3 Cakupan bina pedagang informal	%	67,3	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8	67,25	67,25	67,25			
4	Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pelajar	4 Keselamatan dan Perlindungan	%	57,77	57,77	59	60	61	62	57,77	57,77	58,99			
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISDAGNAKERKOPUKM	5 Nilai SAKIP DisdagnakerkopUKM Hasil Evaluasi Inspektorn	Angka	A	A	A	A	A	A	A	A	B+			

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**1) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Personil**

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Dinas Dagnakerkop dan UKM untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata S2), pengiriman untuk pendidikan dan latihan struktural/penjenjangan karir, dan pengiriman aparatur mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup perencanaan yang diadakan berbagai institusi.

Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
I	Komposisi Menurut Golongan	
1	Golongan IV c	1
2	Golongan IV b	2
3	Golongan IV a	9
4	Golongan III d	6
5	Golongan III c	4
6	Golongan III b	7
7	Golongan III a	10
8	Golongan II d	1
9	Golongan II c	3
	Jumlah	43
I	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
1	S2 (Magister)	9
2	S1 (Sarjana)	25
3	Diploma III	4
4	Diploma 1	-
5	SLTA/Sederajat	5
6	SLTP	-
7	SD	-
	Jumlah	43

Tabel 2.3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering:

No.	Eselon	Jumlah (orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	5
4	IV/a	5
5	IV/b	2
6	Fungsional Tertentu	19
7.	Fungsional Umum	10
	Jumlah	43

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Dagnakerkop dan UKM menghadapi hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun.
2. Masih kurangnya SDM, kuantitas maupun kualitas dengan beban kerja yang dimiliki oleh Dinas Dagnakerkop dan UKM
3. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan SDM terkait dengan Tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Rendahnya semangat kerja dikalangan pegawai karena kurangnya penghargaan terhadap kinerja.
5. Kurangnya sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kendaraan bermotor dan mobiler.

2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Perencanaan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang dapat mengakomodir aspirasi berbagai komponen yang ada di masyarakat serta menjawab permasalahan yang ada di lapangan, serta adanya keterpaduan perencanaan antara pemerhati pembangunan dan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, antara Kabupaten/Kota dan Propinsi Sumatera Barat serta dengan pemerintah pusat, maka diperlukan peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Peencanaan melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan serta ikut aktif mengikuti perkembangan informasi, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan

Sasaran yang dicapai dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun dan menetapkan rencana kinerja dan rencana penganggaran yang didukung dengan APBD dan APBN.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sampai tahun 2011 dokumen perencanaan yang telah disusun Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- a) Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
 - ④ RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010
 - ④ RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011
 - ④ RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2021
 - ④ Dokumen KLHS
 - ④ Renstra Dinas Dagnakerkop 2021-2026
- b) Dokumen Perencanaan Tahunan
 - ④ RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
 - ④ RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Dokumen perencanaan tersebut telah digunakan oleh SKPD lingkup Kabupaten Padang Pariaman untuk menyusun kebijakan/program dan kegiatan tahunannya. Selain itu dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka penyusunan APBD terlebih dahulu dilaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

4) Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Daerah

Sasaran yang dicapai dalam bentuk tersedianya data statistik pembangunan yang menggambarkan kondisi umum Kabupaten Padang Pariaman, gambaran perekonomian, kependudukan, dan sosial.

Di samping itu, terlaksananya pemantauan dan pengendalian pembangunan yang didanai dari APBD/APBN, teridentifikasinya permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta upaya untuk mencari solusi melalui rapat koordinasi pemantauan kegiatan pembangunan serta tersusunnya evaluasi pelaksanaannya. Ketersediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dijadikan bahan masukan ataupun perbandingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang akan datang sehingga secara sinergi pembangunan dan pengendaliannya dapat diwujudkan, sehingga diharapkan mampu mengurangi permasalahan pelaksanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Padang Pariaman

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Unsur Pemerintahan
3. 06 Urusan Pilihan Perdagangan
- Organisasi
3. 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- Sub Unit Organisasi
3. 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDAPATAN DAERAH				-				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-				-
	Retribusi Daerah				-				-
2	BELANJA DAERAH				7.308.589.747.00				8.622.741.667.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Padang Pariaman	70.00%	315,000,100.00	APBD		70.00%	400,300,000.00
2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	Padang Pariaman	85.00%	264,987,500.00	APBD		100.00%	317,000,000.00
2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Padang Pariaman	60 Orang	264,987,500.00	APBD		60 orang	300,000,000.00
2.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Padang Pariaman	5 Lembaga	-			5 LPK	17,000,000.00
2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Padang Pariaman	5 Lembaga	-	APBD		5 Lembaga	17,000,000.00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Padang Pariaman	51.00%	50,012,600.00	APBD		51.00%	83,300,000.00
2.07.05.2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Padang Pariaman	10 Kasus	35,912,050.00	APBD		10 Kasus	45,000,000.00
2.07.05.2.0 1.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Padang Pariaman	10 Kasus	20,000,050.00	APBD		10 Kasus	25,000,000.00
2.07.05.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Asuransi Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPK, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Asuransi serta Pengupahan	Padang Pariaman	10 Laporan	15,912,000.00	APBD		10.000 peserta	20,000,000.00
2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Padang Pariaman	10 Kasus	14,100,550.00			10 Kasus	38,300,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARAHMAN

2.07.05.2.0 2.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Magok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan yang Diregistrasi	Padang Pariaman	10 kasus	14,100,550.00	APBD	10 kasus	20 kasus	20,000,000.00
2.07.05.2.0 2.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Padang Pariaman	1 Lembaga	-	APBD	1 Lembaga	1 Lembaga	18,300,000.00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA RECIL DAN MENENGAH				644,268,000.00				804,545,000.00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		44.50%	21,400,000.00	APBD	43.75%		26,750,000.00
2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Padang Pariaman	20 Unit Usaha	21,400,000.00	APBD	16 Unit Usaha		26,750,000.00
2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Padang Pariaman	24 Unit Usaha	21,400,000.00	APBD	24 Unit Usaha		26,750,000.00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat		40.00%	15,500,000.00	APBD	40.00%		19,375,000.00
2.17.04.2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	Padang Pariaman	24 Unit Usaha	15,500,000.00	APBD	20 Unit Usaha		19,375,000.00
2.17.04.2.0 1.0003	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Padang Pariaman	24 Unit Usaha	15,500,000.00	APBD	24 Unit Usaha		19,375,000.00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang berkualitas	Padang Pariaman	40.00%	538,808,000.00	DAR MON FISIK	40.00%		673,510,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Padang Parlaman	180 Unit Usaha	538,808,000.00	DAK NON FISIK	60 Koperasi	673,510,000.00
2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Padang Parlaman	180 Orang	538,808,000.00	DAK NON FISIK	280 orang	673,510,000.00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melakukan RAT	Padang Parlaman	40.00%	13,560,000.00	APBD	40.00%	16,950,000.00
2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	Padang Parlaman	32 Orang	13,560,000.00	APBD	30 Orang	16,950,000.00
2.17.06.2.0 1.0004	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Padang Parlaman	15 Unit usaha	13,560,000.00	APBD	15 Unit usaha	16,950,000.00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Hasil pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Padang Parlaman	0.90%	55,000,000.00		0.90%	67,920,000.00
2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang bemitra	Padang Parlaman	30 Unit Usaha	55,000,000.00		30 Unit Usaha	67,920,000.00
2.17.07.2.0 1.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Padang Parlaman	30 Unit usaha	20,920,000.00	APBD	30 Unit usaha	22,920,000.00
2.17.07.2.0 1.0003	Fasilitasi Pemutihan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Padang Parlaman	20 unit usaha	10,930,000.00	APBD	20 unit usaha	15,000,000.00
2.17.07.2.0 1.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Padang Parlaman	150 unit usaha	23,150,000.00	APBD	150 unit usaha	30,000,000.00
3.30	URLISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,349,321,647.00			7,417,936,667.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terealisasi Pelayanan Pemerintah Daerah Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Disdagna kerkopU KM	A 100 % 100%	6,258,326,947.00	APBD	A 100 % 100%	6,522,934,667.00
3.30.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Disdagna kerkopU KM	5 Dokumen	29,990,000.00	APBD	5 Dokumen	65,000,000.00
3.30.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja perangkat daerah	Disdagna kerkopU KM	5 Laporan			5 Laporan	
3.30.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdagna kerkopU KM	5 Dokumen	11,896,000.00		5 Dokumen	35,000,000.00
3.30.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Disdagna kerkopU KM	5 Laporan	16,094,000.00	APBD	5 Laporan	30,000,000.00
3.30.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Disdagna kerkopU KM	2 Laporan	5,434,201,467.00	APBD	2 Laporan	5,437,436,667.00
3.30.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdagna kerkopU KM	42 Orang/bulan	5,301,601,467.00	APBD	42 Orang/bulan	5,301,601,467.00
3.30.01.2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdagna kerkopU KM	1 dokumen	123,560,000.00	APBD	1 dokumen	123,835,200.00
3.30.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdagna kerkopU KM	12 Laporan	9,040,000.00	APBD	12 Laporan	12,000,000.00
3.30.01.2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Disdagna kerkopU KM	6 orang	11,000,000.00	APBD	6 orang	25,000,000.00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		14 orang			14 orang	
		Jumlah SKP ASN		43 orang			43 orang	
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran Tpp		43 orang			43 orang	

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIMAN

3.30.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdiagno kerkapu KM	10 orang	11,000,000.00	APBD	10 orang	25,000,000.00
3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Disdiagno kerkapu KM	750 Surat	164,169,000.00	APBD	780 Surat	170,000,000.00
3.30.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Temu	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Disdiagno kerkapu KM	12 Bulan	7,590,000.00	APBD	12 Bulan	12,000,000.00
3.30.01.2.0 6.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdiagno kerkapu KM	12 laporan	156,579,000.00	APBD	12 laporan	158,000,000.00
3.30.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Disdiagno kerkapu KM	1 Unit	10,000,000.00		1 Unit	35,000,000.00
3.30.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Disdiagno kerkapu KM	2 unit	10,000,000.00	APBD	2 unit	35,000,000.00
3.30.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Disdiagno kerkapu KM	12 Bulan	570,030,480.00		12 Bulan	713,500,000.00
3.30.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Disdiagno kerkapu KM	12 Bulan			12 Bulan	
3.30.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Disdiagno kerkapu KM	12 laporan	39,324,300.00	APBD	12 laporan	70,000,000.00
3.30.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdiagno kerkapu KM	12 laporan	177,151,000.00	APBD	12 laporan	203,500,000.00
3.30.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Disdiagno kerkapu KM	12 laporan	353,555,280.00	APBD	12 laporan	440,000,000.00
3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah teraksanannya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Disdiagno kerkapu KM	4 unit	38,936,000.00		10 unit	77,000,000.00
3.30.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelektro	Disdiagno kerkapu KM	10 unit	24,000,000.00	APBD	10 unit	38,000,000.00
3.30.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelektro	Disdiagno kerkapu KM	10 unit	10,760,000.00	APBD	10 unit	15,000,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARLAMAN

3.30.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disdag KerapU KM	4 unit	4,175,000.00	APBD		4 unit	24,000,000.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (HUPP/Silip Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SUP Toko Swalayan)	Padang Parlaman	62.00%	16,599,300.00	APBD	Padang Parlaman	62.00%	100,000,000.00
3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi penerbitan TDG	Padang Parlaman	5 Dokumen	8,299,750.00	APBD		1 Dokumen	45,000,000.00
3.30.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Padang Parlaman	5 Dokumen	8,299,750.00	APBD		1 Dokumen	45,000,000.00
3.30.02.2.0 6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasaan Distribusi, pengemasan, dan pelepasan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor barang berbahaya dan pedagang minor yang diawasi	Padang Parlaman	10 Pedagang	8,299,550.00			10 Pedagang	55,000,000.00
3.30.02.2.0 6.0001	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelepasan bahan berbahaya terhadap penggunaan akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2(P-B2)	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan pelepasan bahan berbahaya terhadap penggunaan akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2(P-B2)	Padang Parlaman	12 Laporan	8,299,550.00	APBD		12 Laporan	55,000,000.00
3.30.03	PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar BANA		3.33%	8,500,500.00	APBD		3.33%	300,000,000.00
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		1 Pasar	8,500,500.00	APBD		1 Pasar	300,000,000.00
3.30.04.2.0 2.0001	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Padang Parlaman	1 Unit	8,500,500.00	APBD		1 Unit	300,000,000.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		0.42%	16,600,500.00	APBD		0.42%	175,000,000.00
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)		10 Pasar	8,300,500.00	APBD		10 Pasar	125,000,000.00
3.30.04.2.0 2.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Padang Parlaman	12 Laporan	8,300,500.00	APBD		12 Laporan	125,000,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Padang Pariaman	10 Kios	8,300,000.00	APBD	10 Kios	50,000,000.00
3.30.04.2.0 3.0003	Pengawasan Penyaluran dan Pengantoran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Pengantoran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Padang Pariaman	12 Laporan	8,300,000.00	APBD	12 Laporan	50,000,000.00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar terbeli ukur	Padang Pariaman	3.33%	40,954,700.00	APBD	3.33%	50,000,000.00
3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (LITIP) bertanda tera sah berlaku	Padang Pariaman	15.00%	40,954,700.00	APBD	15.00%	50,000,000.00
3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Pengalokasian Ditera Ulang	Padang Pariaman	1.100 Unit	40,954,700.00	APBD	1.100 Unit	50,000,000.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan Pedagang Informal	Padang Pariaman	10.00%	8,259,700.00	APBD	10.00%	270,000,000.00
3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	Padang Pariaman	5 Kali	8,259,700.00	APBD	5 Kali	270,000,000.00
3.30.07.2.0 1.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Padang Pariaman	2 UMKM	8,259,700.00	APBD	2 UMKM	270,000,000.00

Parلمان, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL

YUNIATI

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JOH KENET, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19650525 198903 1 007

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dituangkan dalam rencana strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2021 – 2026. Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM disusun mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kab Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 ditetapkan tolok ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Dinas Dagnakerkop dan UKM yang merupakan sinergisitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan SKPD, maka untuk tahun 2025 pada Dinas Dagnakerkop dan UKM menginventaris usulan masyarakat yang berasal dari Musrenbang sebagaimana tercantum dalam table berikut ini :

Tabel 2.5.1
REKAP USULAN MUSRENBANG NAGARI TAHUN 2024 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2025
DISDAGNAKERKOP & UKM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Anggaran
1		Sungai Buluah Selatan	ARMUZAN, SST	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	Banyak masyarakat yang kreatif dan memiliki kompetensi namun tidak ada faktor pendukung untuk merealisasikannya (UMKM)	Korong Kayu Kapua, Korong Kabun, Korong Genuang Kanter, Korong Palapa Saiyo I & Korong Palapa Saiyo II, Kab. Padang Pariaman	
2		Sunua Barat	Sukardi Syukur, BSc	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	umkm di Nagari Sunua Barat perlu dilakukan pembinaan agar produk yang dijual atau yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran, pengemasan dan target penjualan perlu dibantu.	sunua barat, Kab. Padang Pariaman	

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Anggaran
3		Koto Tinggi Kuranji	Amizuir Dt Tansati	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	Permohonan Bantuan Modal UMKM dikarenakan Kurangnya Modal Bagi Ibu Rumah Tangga yg mau bikin Usaha mikro Kecil Menengah	Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kab. Padang Pariaman	
4		Kampung Gelapuang Ulahan	ALI WALDANA, ST	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	membutuhkan gerobak pedagang kaki lima, karena masih banyak pedagang yang bukak lapak di trotoar	Korong Pasa, Kab. Padang Pariaman	
5		Kudu Gantiang	JHONI BAHRUL FUADI	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan	Kondisi Los/Pasar Sudah Rusak	Pasa Balai Kudu, Nagari Kudu Gantiang, Kab. Padang Pariaman	
TOTAL ANGGARAN							Rp. 350.000.000


 Padang, 19 Juli 2024
 Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

Jon Kenedi S.Sos. MM
 Pembina Utama Muda NIP 19690525 198903 1 007

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2014-2026, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
- Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan seperti PLTMH, tenaga surya dan biomassa.
- Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
- Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2014-2026 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Dagnakerkop Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
<i>Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur</i>	<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>	<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>
1 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1 Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",	1 Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2 Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2 Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3 Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4 Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4 Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5 Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari		6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
8 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional		

Tabel 3.1.2
Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2014-2025 dengan Visi Misi
Padang Pariaman Tahun 2021-2025

VISI RPJMN TAHUN 2014-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
MISI RPJMN TAHUN 2014-2025		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian visi Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 yakni **"Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha mikro, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan"**.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 karena tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD (Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMN Tahun 2021-2026.

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

Untuk itu sejalan dengan Kebijakan pembangunan Padang Pariaman tahun 2025 mengusung tema **"Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat"** dengan 7 (Tujuh) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama berlandaskan " adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
2. Penguatan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tntz ruzng wilayah;
3. Penguatan ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berketahanan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar;
7. Peningkatan investasi dan kapasitas fiskal daerah.

Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Penetapan plafon anggaran dan bagaimana mendorong konsistensi pagu pendanaan dari awal sampai akhir.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM 2025 sesuai dengan prioritas yang pertama, kedua dan ketujuh maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop dan UKM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi	5,5 %
		Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	3,15 %
		Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Cakupan bina pedagang informal	20 %
2	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja	40 %
		Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan	61 %

RENJA TAHUN 2025

REVISI PERENCANAAN					
Jenis Tm		Daerah		Tingkat	
Kumul	Per	Kumul	Per	Kumul	Per
3/6-02-24	7	20/1-24	1	20/1-24	4

Paraf Verifikasi

Ka. Bapetiltbang

Inspektur

Kabag Organisasi

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISDAGNAKERKOPUKM	Nilai SAKIP DisdagnakerkopUKM Hasil Evaluasi Inspektorat	82

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3. Meningkatnya pengembangan UMKM dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
4. Peningkatan pemberdayaan UMKM
5. Meningkatnya penyediaan informasi perdagangan dan kebijakan daerah yang mengatur terhadap tata kelola perdagangan
6. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perdagangan dan distribusi barang
7. Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Pelaku Usaha Perdagangan dan Distribusi Produk Daerah
8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa
9. Meningkatnya Pengembangan Promosi dan Pemasaran Perdagangan Produk Komoditi Daerah
10. meningkatnya penertiban standarisasi dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha
11. Meningkatnya Kapasitas dan Keterampilan bagi pencari kerja
12. Meningkatnya Kapasitas dan peran lembaga Pelatihan Kerja dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja
13. Meningkatnya Informasi dan pelayanan Pasar Kerja (IPK) yang dapat di akses oleh Pencari Kerja
14. Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
15. Meningkatnya kerjasama dengan penyedia jasa tenaga kerja pemerintah dan swasta
16. Meningkatnya kepatuhan perusahaan tentang penerapan Keselamatan dan Norma Kerja
17. Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
18. Meningkatnya Pencegahan dan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan DISDAGNAKERKOPUKM
20. Meningkatnya pelayanan umum DISDAGNAKERKOPUKM

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2025 Dinas Dagnakerkop dan UKM menyelenggarakan 1 (satu) Urusan Pilihan yaitu Perdagangan dan dua urusan wajib yaitu Tenaga Kerja dan Koperasi UKM.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Dinas Dagnakerkop & UKM Tahun 2025 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berikut:

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

Tabel T-C.33

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Padang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
- 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	BERDASARKAN KEPENDAGRI 050-5889	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDAPATAN DAERAH				-				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-				-
	Retribusi Daerah				-				-
2	BELANJA DAERAH				7,308,589,747.00				8,522,741,667.00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				315,000,100.00				400,300,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Padang Pariaman	70.00%	264,987,500.00	APBD		70.00%	317,000,000.00
2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pemertisase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	Padang Pariaman	85.00%	264,987,500.00	APBD		100.00%	300,000,000.00
2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Master Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Padang Pariaman	60 Orang	264,987,500.00	APBD		60 orang	300,000,000.00
2.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Padang Pariaman	5 Lembaga	-			5 LPK	17,000,000.00
2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Padang Pariaman	5 Lembaga	-	APBD		5 Lembaga	17,000,000.00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Padang Pariaman	51.00%	50,012,600.00	APBD		51.00%	83,300,000.00
2.07.05.2.0 1	Penerapan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Padang Pariaman	10 Kasus	35,912,050.00	APBD		10 Kasus	45,000,000.00
2.07.05.2.0 1.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Padang Pariaman	10 Kasus	20,000,050.00	APBD		10 Kasus	25,000,000.00
2.07.05.2.0 1.0003	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Aminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bapertih) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Padang Pariaman	10 Laporan	15,912,000.00	APBD		10.000 peserta	20,000,000.00
2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Padang Pariaman	10 Kasus	14,100,550.00			10 Kasus	38,300,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.07.05.2.0 2.0001	Pengecehan Persetujuan Hubungan Industri, Magok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan yang Dicegah	Padang Parlaman n	10 kasus	APBD	10 kasus	20 kasus
2.07.05.2.0 2.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dihina	Padang Parlaman n	1 Lembaga	APBD	-	I Lembaga
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				644,268,000.00		804,505,000.00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		44.50%	21,400,000.00	APBD	43.75%
2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Padang Parlaman	20 Unit Usaha	21,400,000.00	APBD	16 Unit Usaha
2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Padang Parlaman n	24 Unit Usaha	21,400,000.00	APBD	24 Unit Usaha
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat		40.00%	15,500,000.00	APBD	40.00%
2.17.04.2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	Padang Parlaman	24 Unit Usaha	15,500,000.00	APBD	20 Unit Usaha
2.17.04.2.0 1.0003	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi/ Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Padang Parlaman n	24 Unit Usaha	15,500,000.00	APBD	24 Unit Usaha
2.17.05	PROGRAM PENDUKUKAN DAN LATIHAN PERKOPERAGAN	Persentase koperasi yang berkualitas	Padang Parlaman n	40.00%	538,808,000.00	DAK NON FISIK	40.00%
							671,510,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Padang Parلمان	180 Unit Usaha	538,808,000.00	DAK NON FISIK	60 Koperasi	673,510,000.00
2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Koperasi dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Padang Parلمان	180 Orang	538,808,000.00	DAK NON FISIK	180 orang	673,510,000.00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melakukan RAT	Padang Parلمان	40.00%	13,560,000.00	APBD	40.00%	16,950,000.00
2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	Padang Parلمان	32 Orang	13,560,000.00	APBD	30 Orang	16,950,000.00
2.17.06.2.0 1.0004	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Padang Parلمان	15 Unit usaha	13,560,000.00	APBD	15 Unit usaha	16,950,000.00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Padang Parلمان	0.90%	55,000,000.00		0.90%	67,930,000.00
2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Padang Parلمان	30 Unit Usaha	55,000,000.00		30 Unit Usaha	67,930,000.00
2.17.07.2.0 1.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Padang Parلمان	30 Unit usaha	20,930,000.00	APBD	30 Unit usaha	22,930,000.00
2.17.07.2.0 1.0003	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Padang Parلمان	20 unit usaha	10,930,000.00	APSD	20 unit usaha	15,000,000.00
2.17.07.2.0 1.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar	Padang Parلمان	150 unit usaha	23,150,000.00	APBD	150 unit usaha	30,000,000.00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,349,321,647.00			7,437,936,667.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektori Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Persentase Temuan BPK yang Dihilangkan	Disiapkan kerkopu KM	A 100 % 100%	6,258,326,947.00	APBD	A 100 % 100%	6,522,936,667.00
3.30.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Disiapkan kerkopu KM	5 Dokumen	29,990,000.00	APBD	5 Dokumen	65,000,000.00
		Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja perangkat daerah	Disiapkan kerkopu KM	5 Laporan			5 Laporan	
3.30.01.2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disiapkan kerkopu KM	5 Dokumen	13,896,000.00		5 Dokumen	35,000,000.00
3.30.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Disiapkan kerkopu KM	5 Laporan	16,094,000.00	APBD	5 Laporan	30,000,000.00
3.30.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang	Disiapkan kerkopu KM	2 Laporan	5,434,201,467.00	APBD	2 Laporan	5,437,436,667.00
3.30.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disiapkan kerkopu KM	42 Orang/bulan	5,301,601,467.00	APBD	42 Orang/bulan	5,301,601,467.00
3.30.01.2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disiapkan kerkopu KM	1 dokumen	123,560,000.00	APBD	1 dokumen	123,835,200.00
3.30.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disiapkan kerkopu KM	12 Laporan	9,040,000.00	APBD	12 Laporan	12,000,000.00
3.30.01.2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Disiapkan kerkopu KM	6 orang	11,000,000.00	APBD	6 orang	25,000,000.00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		14 orang			14 orang	
		Jumlah SKP ASN		43 orang			43 orang	
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		43 orang			43 orang	

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

3.30.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdagra kerkapu KM	10 orang	21,000,000.00	APBD	10 orang	25,000,000.00
3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Disdagra kerkapu KM	750 Surat	164,169,000.00	APBD	780 Surat	170,000,000.00
3.30.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Timu	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Disdagra kerkapu KM	12 Bulan	7,590,000.00	APBD	12 Bulan	12,000,000.00
3.30.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdagra kerkapu KM	12 laporan	156,579,000.00	APBD	12 laporan	158,000,000.00
3.30.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah penambahan nilai aset	Disdagra kerkapu KM	1 Unit	10,000,000.00		1 Unit	35,000,000.00
3.30.01.2.0 7.0005	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Disdagra kerkapu KM	2 unit	10,000,000.00	APBD	2 unit	35,000,000.00
3.30.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang pemerintah yang tersedia	Disdagra kerkapu KM	12 Bulan	570,030,480.00		12 Bulan	713,500,000.00
3.30.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa penunjang pemerintahan yang disediakan	Disdagra kerkapu KM	12 Bulan			12 Bulan	
3.30.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat	Disdagra kerkapu KM	12 laporan	39,324,300.00	APBD	12 laporan	20,000,000.00
3.30.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Disdagra kerkapu KM	12 laporan	177,151,000.00	APBD	12 laporan	203,500,000.00
3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdagra kerkapu KM	12 laporan	353,555,180.00	APBD	12 laporan	440,000,000.00
3.30.01.2.0 9.0001	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terfaksikananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Disdagra kerkapu KM	4 unit	38,936,000.00		10 unit	77,000,000.00
3.30.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Lainnya yang Dipelihara	Disdagra kerkapu KM	10 unit	24,000,000.00	APBD	10 unit	38,000,000.00
3.30.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disdagra kerkapu KM	10 unit	10,760,000.00	APBD	10 unit	15,000,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KOPERASI DAN UKM KAB. PADANG PARAHMAN

3.30.03.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Dipertah/Direhabilitasi	Disiapkan RKM	4 unit	4,176,000.00	APBD	4 unit	24,000,000.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perencanaan dan LUTM/LUTS/SIUP Toko Swalayan)	Padang Parahman	62.00%	16,599,300.00	APBD	Padang Parahman	100,000,000.00
3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi penerbitan TDG	Padang Parahman	5 Dokumen	8,299,750.00	APBD	1 Dokumen	45,000,000.00
3.30.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Padang Parahman	5 Dokumen	8,299,750.00	APBD	1 Dokumen	45,000,000.00
3.30.02.2.0 6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasaan Distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor barang berbahaya dan pedagang minor yang diawasi	Padang Parahman	10 Pedagang	8,299,550.00		10 Pedagang	55,000,000.00
3.30.02.2.0 6.0001	pengawasan distribusi, pengemasan danpelabelan bahan berbahaya terhadap penggunaan akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produksi B2(P-B2)	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan danpelabelan bahan berbahaya terhadap penggunaan akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produksi B2(P-B2)	Padang Parahman	12 Laporan	8,299,550.00	APBD	12 Laporan	55,000,000.00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar BANA		3.33%	8,500,500.00	APBD	3.33%	300,000,000.00
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelalaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelalaan sarana distribusi perdagangan		1 Pasar	8,500,500.00	APBD	1 Pasar	300,000,000.00
3.30.04.2.0 2.0001	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Padang Parahman	1 Unit	8,500,500.00	APBD	1 Unit	300,000,000.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		0.42%	16,600,500.00	APBD	0.42%	175,000,000.00
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)		10 Pasar	8,300,500.00	APBD	10 Pasar	125,000,000.00
3.30.04.2.0 2.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Padang Parahman	12 Laporan	8,300,500.00	APBD	12 Laporan	125,000,000.00

DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KAB PADANG PARIAMAN

3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Padang Pariaman	10 Kios	8,300,000.00	APBD	10 Kios	50,000,000.00
3.30.04.2.0 3.0003	Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Padang Pariaman	12 Laporan	8,300,000.00	APBD	12 Laporan	50,000,000.00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLUNDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar tertib ukur	Padang Pariaman	3.33%	40,994,700.00	APBD	3.33%	50,000,000.00
3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTF) bertanda tera sah berlaku	Padang Pariaman	15.00%	40,994,700.00	APBD	15.00%	50,000,000.00
3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Padang Pariaman	1.100 Unit	40,994,700.00	APBD	1.100 Unit	50,000,000.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan Pedagang Informal	Padang Pariaman	10.00%	8,299,700.00	APBD	10.00%	270,000,000.00
3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	Padang Pariaman	5 Kali	8,299,700.00	APBD	5 Kali	270,000,000.00
3.30.07.2.0 1.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Padang Pariaman	2 UMKM	8,299,700.00	APBD	15 UMKM	270,000,000.00

Parلمان, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL



**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



Pariaman, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja
Koperasi dan UKM

Jon Kenedi, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda NIP 19690525 198903 1 007